

Literasi Governance Kelembagaan Desa Wisata Bumiwangi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung

Majidah* dan Cahyaningsih

School of Economics and Business, Telkom University, Bandung, Indonesia

*Penulis korespondensi: majidah@telkomuniversity.ac.id

Dikirim : 5 Juli 2024

Direvisi : 31 Agustus 2024

Diterima : 6 September 2024

Abstrak: Desa Wisata Bumiwangi terletak di Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Desa tersebut memiliki beberapa keunggulan, yakni terdapat destinasi wisata terbang layang dan gantole serta mayoritas penduduk berusia produktif dan memiliki pekerjaan pada berbagai sektor, termasuk karyawan swasta. Desa Bumiwangi juga telah memiliki sistem informasi desa wisata, tetapi sistem informasi tersebut belum lengkap dan tidak mutakhir, termasuk informasi mengenai profil perangkat desa, tugas, dan tanggung jawab yang belum tersedia. Permasalahan ini berpotensi tidak mendapatkan predikat desa wisata karena tidak memenuhi kriteria dan menghambat perkembangan perekonomian desa tersebut. Mengacu pada permasalahan yang ada, maka dilakukan pengabdian masyarakat dengan topik governance kelembagaan untuk pengembangan desa wisata sehingga dapat menumbuhkan perekonomian desa tersebut. Dengan pemberdayaan kelembagaan desa melalui penataan governance-nya, pengelolaan Desa Wisata Bumiwangi diharapkan menjadi akuntabel dan transparan untuk mendorong pengelolaan desa wisata yang produktif, dapat menumbuhkembangkan perekonomian desa. Pengabdian ini dilakukan dengan model literasi governance kelembagaan desa wisata yang meliputi definisi desa wisata, dasar hukum, tipe desa wisata, struktur organisasi, dan deskripsi pekerjaan. Melalui pre-test dan post-test, diperoleh hasil yang memuaskan. Hal tersebut menjelaskan bahwa peserta memahami governance kelembagaan sehingga dapat menjadi bekal untuk pendampingan implementasinya dalam kegiatan lanjutan dari skema abdimas ini.

Kata kunci: akuntabel, governance kelembagaan, transparan

Abstract: Bumiwangi Tourism Village is in Ciparay District, Bandung Regency, West Java. The village has several advantages include there are gliding and hang-gliding tourist destinations, and most of the population is of productive age and have jobs in various sectors, including private employees. The village information system is incomplete and not updated, as are the profiles of village officials, their duties and responsibilities. It does not meet the criteria of a tourist village and has the potential to hinder the economic development of the village. Referring to this problem, it is necessary to carry out community service related to institutional governance for the development of tourist villages, so that it can grow the village economy. By empowering village institutions through governance, it is hoped that the management of The Tourism Village will become accountable and transparent, so that it becomes a productive tourism village and can grow the village economy. The institutional governance literacy model used in this community service includes the definition of a tourist village, legal basis, type of tourist village, organizational structure and job description. Through pre and posttests, satisfactory results were obtained. This shows that participants understand institutional governance, so that it can be a provision for assistance in further community service activities.

Keywords: *accountable, institutional governance, transparency*

1. Pendahuluan

Wisata Bumiwangi terletak di Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Luas wilayah Bumiwangi 433,188 KM, wilayah tersebut terbagi menjadi lahan pertanian dan non lahan pertanian. Batas utara desa adalah Desa Serang Mekar, batas timur adalah Desa Gunung Leutik, batas Selatan adalah Desa Mekar Laksana, dan batas barat adalah Desa Ciheulang. Destinasi wisata di Desa Bumiwangi adalah Bukit Cula. Destinasi wisata tersebut dimanfaatkan untuk olahraga paralayang dan gantole. Destinasi wisata tersebut dapat dimanfaatkan menjadi daerah wisata terpadu. Oleh karena itu, perlu digali potensi desa wisata Bumiwangi ini, termasuk usia dan latar belakang pekerjaan penduduk.

Jumlah penduduk Desa Wisata sebanyak 22.357 orang. Penduduk wanita berjumlah 10.795 (48,28%). Mayoritas penduduk adalah pria. Sementara itu, penduduk usia produktif (15-64 tahun) adalah 15.011 (69,64%) (Sae, 2019). Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas penduduk merupakan usia produktif. Sebaran pekerjaan penduduk usia produktif antara lain pada lingkungan pertanian, perdagangan, *home industry*, perkebunan, dan karyawan swasta. Potensi daerah dan potensi penduduk usia produktif menjadi modal utama untuk memajukan desa wisata Bumiwangi. Destinasi wisata dan pengembangan wisata terpadu di desa wisata Bumiwangi ditunjukkan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Daerah Destinasi Wisata di Desa Wisata Bumiwangi

Desa Wisata Bumiwangi menjadi alternatif destinasi wisata di Kabupaten Bandung, Bumiwangi dapat menjadi destinasi wisata terpadu yang potensial, yaitu dengan dukungan kondisi alam, penduduk usia produktif yang mendominasi total penduduk desa dan keragaman jenis pekerjaan. Desa wisata dipimpin oleh ketua desa. Oleh karena sudah menjadi desa wisata, pemerintah desa sudah terbentuk dan telah memiliki Sistem Informasi Desa Wisata Bumiwangi. Namun, sistem informasi tersebut belum lengkap dan tidak mengalami kebaruan dari segi profil perangkat desa, tugas, dan tanggung jawab. Kondisi ini akan menghambat

pimpinan desa berakuntabilitas dan penerapan pengelolaan yang transparan. Permasalahan ini jika dibiarkan akan mengakibatkan predikat sebagai desa wisata hilang, karena tidak memenuhi kriteria dan menghambat perkembangan dan pertumbuhan perekonomian desa tersebut. Sementara itu, desa Bumiwangi memiliki potensi seperti mayoritas penduduk berusia produktif, penduduk memiliki keragaman usaha, dukungan kepala desa dan jajarannya, serta ketersediaan lahan desa untuk dimanfaatkan menjadi lahan pertanian dan usaha yang berpotensi menjadi destinasi wisata.

Mengacu pada permasalahan dan potensi daerah, maka perlu peningkatan pemahaman *governance* kelembagaan desa wisata sehingga diharapkan penanggung jawab desa wisata mengelola kelembagaan desa memenuhi kriteria prinsip-prinsip *governance* yang akuntabel dan transparan (CUI-ITB, 2017). Pembinaan tata kelola desa wisata diatur dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2022 Pasal 10 (Gubernur Jawa Barat, 2022). Kondisi ini memudahkan dalam bersinergi dengan penduduk desa untuk maju bersama dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa, kesempatan kerja yang produktif beserta menyeluruh, dan pekerjaan yang layak untuk penduduk desa melalui pengembangan desa wisata. Pengembangan desa wisata didasarkan pada klasifikasi desa wisata, yaitu rintisan, berkembang, maju, dan mandiri (Wirdayanti dkk., 2021). Sementara itu, *governance* yang dimaksud merupakan tata kelola mengacu pada prinsip-prinsip *governance*. Pengertian *governance* adalah interaksi struktur, proses, beserta tradisi yang menentukan bagaimana kekuasaan beserta tanggung jawab dilaksanakan dan bagaimana keputusan diambil (Graham *et al.*, 2003). Prinsip *governance* terdiri atas akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, independensi, dan *fairness*. Pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut dalam rangka penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis kelembagaan (Hidayah, 2023; Sofyani dkk., 2020). Sementara itu, sistem kelembagaan adalah suatu sistem yang mampu menggerakkan masyarakat (Denok dkk., 2017). Berdasarkan kedua pengertian ini, sasaran *governance* adalah menggerakkan warga untuk mencapai tujuan, yaitu keberhasilan dan kelangsungan usaha.

2. Metode

Metode pengabdian masyarakat (abdimas) menggunakan model pembelajaran literasi, yakni model pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan kognisi, keterampilan, dan kemampuan berkomunikasi (Miterianifa & Mawarni, M.F., 2024; Kusripinah & Subrata, 2022). Pelaksanaan kegiatan abdimas dengan model literasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Identifikasi masalah: Pemetaan masalah menyangkut tingkat pemahaman *governance* untuk kelembagaan, struktur organisasi, dan konsep desa wisata. Pemetaan masalah ini didasarkan pada survei awal yang dilakukan pada mitra sasaran, yaitu Pejabat Desa Bumiwangi dan Koordinator Desa Wisata Bumiwangi.
- b) Penyiapan materi abdimas: Materi abdimas disiapkan sesuai dengan kebutuhan sebagaimana hasil identifikasi. Materi ini didiskusikan dengan tim abdimas.
- c) Pelaksanaan abdimas: Pelaksanaan abdimas direncanakan dulu dan dikoordinasikan dengan mitra sasaran. Mitra sasaran menyiapkan masyarakat sasaran sebanyak 25 orang. Mitra sasaran membantu pelaksanaan abdimas.
- d) Evaluasi keberhasilan abdimas: Evaluasi dilakukan sebelum dan setelah kegiatan abdimas, melalui *pre-test* dan *post-test* dengan memanfaatkan *mobile phone*.

3. Hasil dan Diskusi

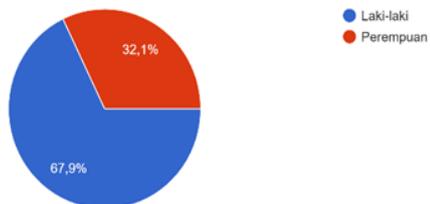
Abdimas *governance* kelembagaan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa Wisata Bumiwangi. Sebelum melakukan literasi, para peserta pelatihan tata kelola (*governance*) kelembagaan diberi *pre-test* tentang materi tersebut. *Pre-test* berguna untuk mengukur tingkat pemahaman awal sebelum melakukan literasi. Setelah melakukan literasi, kemudian dilakukan *post-test*, untuk mengukur tingkat pemahaman pascapelatihan. Hasil *pre-test* dan *post-test* dijelaskan setelah biodata peserta.

Pelaksanaan kegiatan abdimas ini ditunjukkan dengan Gambar 2. Gambar 2 menunjukkan pelaksanaan pengabdian masyarakat dengan urutan kegiatan sebagai berikut : (1) sambutan tim abdimas, (2) penyampaian materi utama sesuai tema, pengenalan berbagai jenis beserta klasifikasi desa wisata, *governance* kelembagaan, struktur organisasi beserta deskripsi tugas lembaga desa wisata, dan sesi tanya jawab, (3) Penandatanganan berita acara kegiatan pengabdian masyarakat, dan (4) foto bersama dengan peserta penggerak desa wisata, kelompok sadar wisata, penggerak PKK, dan tim abdimas. Sementara itu, data peserta pelatihan berdasarkan jenis kelamin, umur, dan latar belakang pendidikan diberikan dalam diagram lingkaran pada Gambar 3. Data yang diberikan dalam Gambar 3 menunjukkan bahwa mayoritas peserta yaitu sebesar 67,9% adalah pria serta mayoritas pendidikan peserta yaitu sekitar 46% berpendidikan SMA atau setara SMA. Sementara itu, hasil *pre-test* untuk para peserta pelatihan diberikan dalam Gambar 4.

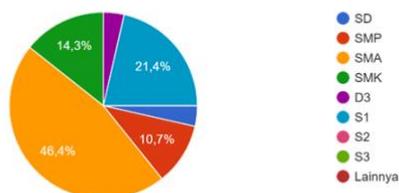


Gambar 2. Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di Desa Bumiwangi

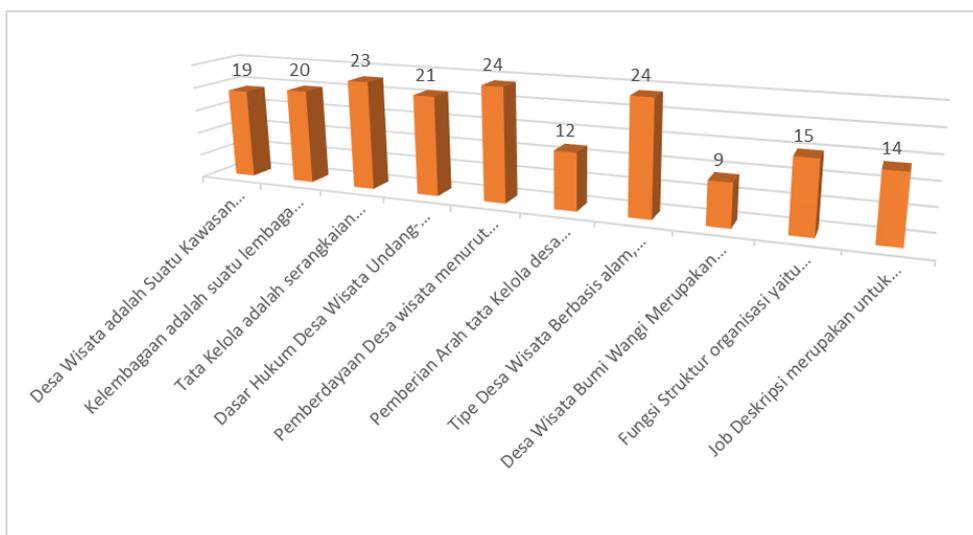
Jenis Kelamin
28 jawaban



Pendidikan Terakhir
28 jawaban



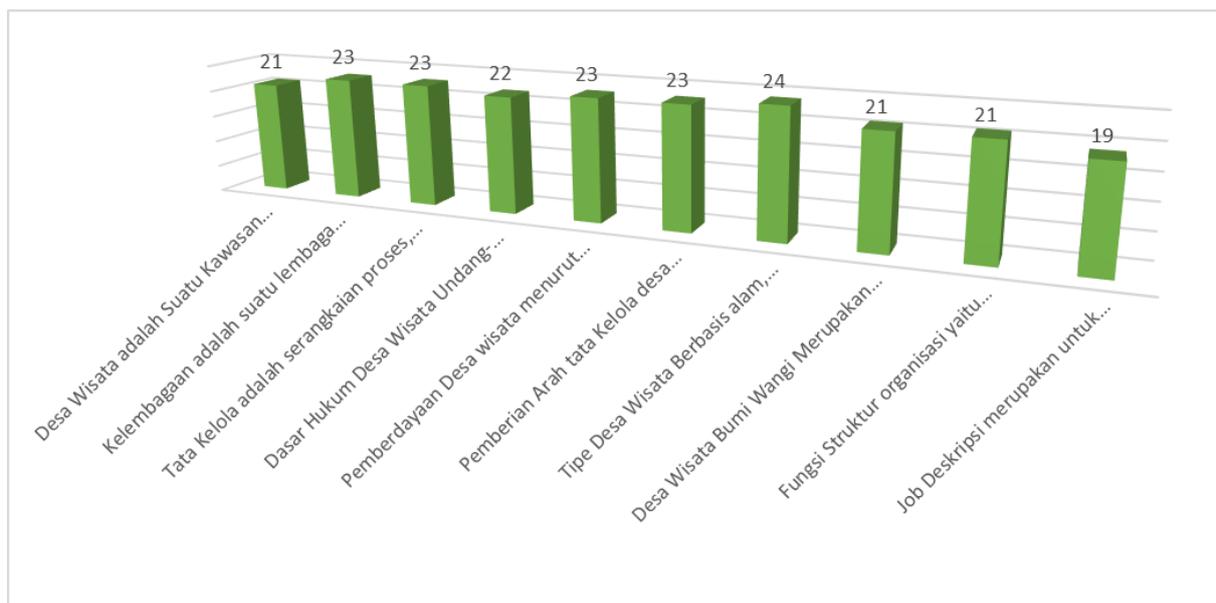
Gambar 3. Data peserta pelatihan berdasarkan jenis kelamin, umur, dan latar belakang pendidikan



Gambar 4. Hasil pretest governance kelembagaan

Gambar 4 menunjukkan hasil kuesioner dari 10 pertanyaan tentang (1) Pengertian desa wisata, (2) Kelembagaan, (3) Tata kelola, (4) Dasar hukum desa wisata, (5) Pemberdayaan desa wisata, (6) Arah tata kelola kelembagaan, (7) Tipe desa wisata, (8) Rintisan desa wisata, (9) Fungsi struktur organisasi dan *job desc* (deskripsi pekerjaan). Hasil kuesioner menunjukkan respons responden untuk pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 7 berkisar antara 79%-100% yang menyiratkan bahwa sebelum mengikuti pelatihan *governance* kelembagaan, peserta telah memahami pengertian desa wisata, kelembagaan desa wisata, *governance*, dasar hukum desa wisata, pemberdayaan desa wisata, dan tipe desa wisata. Sementara itu, respons responden untuk pertanyaan nomor 6, 8, 9, dan 10 berkisar antara 37,5%-62,5%. Nilai terendah berada pada pertanyaan nomor 8 tentang desa rintisan yang menyiratkan bahwa masih terdapat peserta yang belum memahami tentang arah pengelolaan desa wisata, desa wisata rintisan, fungsi struktur organisasi, dan *job desc*.

Hasil *post-test* merupakan pengukuran pascapenyampaian materi literasi kelembagaan dan diberikan dalam Gambar 5.



Gambar 5. Hasil *post-test* *governance* kelembagaan

Post-test sebagaimana Gambar 5 menunjukkan hasil yang menggembirakan untuk semua aspek materi *governance* kelembagaan yang ditanyakan, nilai berkisar antara 79%-100%. Dengan demikian, literasi *governance* kelembagaan meningkatkan pemahaman masyarakat sasaran sebagai peserta pelatihan. Hasil ini menjadi bekal untuk pendampingan implementasi *governance* kelembagaan pada abdimas berikutnya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan abdimas, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) mayoritas peserta pelatihan *governance* kelembagaan adalah pria dengan pendidikan peserta berupa SMA; (2) hasil *pre-test* menunjukkan sebelum mengikuti pelatihan *governance* kelembagaan, peserta telah memahami pengertian desa wisata. Berarti masih terdapat peserta yang belum memahami tentang arah pengelolaan desa wisata, desa wisata rintisan, fungsi struktur organisasi, dan deskripsi pekerjaan; (3) hasil *post-test* literasi *governance* kelembagaan meningkatkan pemahaman masyarakat sasaran sebagai peserta pelatihan.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Telkom University yang telah mendanai, mendukung, dan mengarahkan kegiatan pengabdian masyarakat skema desa binaan ini.

Daftar Referensi

- CUI-ITB. (2017). Keterkaitan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pencapaian *Good Governance*. *Jurnal Perencanaan Wilayah Kota*, 15(1), 34-47.
- Denok, K., Setyoko, P. I., & Imron, M. (2017). *Collaborative Governance* dalam Penguatan Kelembagaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Kabupaten Banyumas. *Sosiohumaniora*, 19(1), 1-7.
- Graham, J., Amos, B., & Plumtre, T. (2003). Governance Principles for Protected Area in the 21st Century. *The 5th World Park Congress*, 1-40. Canada: Governance Principles for Protected Areas.
- Gubernur Jawa Barat. (2022). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Desa Wisata. Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- Hidayah, A.L. (2023). 5 (Lima) Prinsip *Good Governance* dalam Pengurusan Piutang Negara. Available at: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16062/5-Lima-Prinsip-Good-Governance-dalam-Pengurusan-Piutang-Negara.html>
- Kusripinah, R.R.E. & Subrata, H. (2022). Penerapan Model Pembelajaran untuk Meningkatkan Literasi Baca Tulis: Literature Review. *Pionir: Jurnal Pendidikan*, 11(2), 29-38.
- Miterianifa & Mawarni, M.F. (2024). Penerapan Model Pembelajaran Literasi Lingkungan dalam Meningkatkan Pengetahuan dan Kesadaran Lingkungan. *Jurnal Sains dan Edukasi Sains*, 7(1), 68-73.

- Sae, A. (2019). *Data Profil RT RW Tahun 2019: Desa Bumiwangi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung*. Available at: <https://www.scribd.com/document/419728993/Te>
- Sofyani, H., Ali, U.N.N.A., & Septiari, D. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Perannya terhadap Kinerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 5(2), 325-359.
- Wirdayanti, A., Asri, A., Anggono, B.D., Hartoyo, D.R., Indarti, E., Gautama, H., Setyowati, H.E., Harefa, K., Minsia, M., Rumayar, M., Indrijatiningrum, M., Susanti, T., & Ariani, V. (2021). *Pedoman Desa Wisata*. Jakarta: Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi.